

Koreksi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis

Nurul Pratiwi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
8050222049@uin-alauddin.ac.id

Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
8050222039@uin-alauddin.ac.id

Rahmawati Muin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

Wahid Haddade

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

This research aims to analyze the correction of Islamic business ethics to the capitalist and socialist economic systems. This research uses a qualitative method with a library research approach. Islamic business ethics correct the capitalist economic system by emphasizing the principles of justice, balance, and social responsibility. Capitalist and socialist economic systems have shortcomings in terms of business ethics. Capitalism tends to prioritize profit and ignore social justice, while socialism negates private ownership and individual rights. Islamic business ethics come as a solution to balance the two systems. Islamic business ethics also correct the socialist economic system by recognizing private property rights and individual freedom. By applying Islamic business ethics, businesses can be more oriented towards social and environmental interests, as well as more fair in the distribution of wealth.

Keywords: *capitalist, socialist, ethical, business, and Islam*

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, sistem ekonomi dunia telah berkembang menjadi dua sistem utama: sistem kapitalis dan sistem sosialis. Sistem kapitalis, yang berbasis pada prinsip kebebasan pasar dan swasta, telah menjadi dominan di banyak negara. Sementara itu, sistem sosialis, yang berbasis pada prinsip kekuasaan negara dan kontrol sosial, telah menjadi model alternatif di beberapa negara. Namun, keduanya memiliki kelemahan dan kekurangan yang signifikan, serta tidak memenuhi nilai-nilai etika bisnis Islam yang lebih luas dan lebih dalam (Abdillah, 2015).

Dalam sistem kapitalis, kebebasan pasar dan swasta dapat memungkinkan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga dapat mengarah pada ketimpangan dan kesenjangan sosial. Kekayaan dapat terkonsentrasi pada beberapa individu atau kelompok, sementara sebagian besar masyarakat lainnya harus hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Selain itu, sistem kapitalis juga

dapat memungkinkan perilaku bisnis yang tidak etis, seperti korupsi, manipulasi pasar, dan penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Khoiry et al., 2023).

Sistem sosialis, yang berbasis pada kekuasaan negara dan kontrol sosial, dapat memungkinkan penyebaran kekayaan dan kemajuan sosial, juga dapat mengarah pada kekurangan dan kelemahan lainnya. Kekuasaan negara dapat memungkinkan penggunaan kekuatan untuk memaksakan kebijakan, yang dapat mengganggu kebebasan individu dan menghambat inovasi. Sistem sosialis juga dapat memungkinkan korupsi dan nepotisme, serta penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Yan, 2016).

Dalam konteks ini, koreksi etika bisnis Islam terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis sangat penting. Islam memandang bisnis sebagai bagian dari kehidupan manusia yang harus dijalankan dengan etika dan nilai-nilai agama. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

يَنْوَلُوا تَلْفُورًا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

"Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS Al-Baqarah/2: 195).

Dalam ayat ini, Allah swt. menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan kehormatan dalam segala aspek kehidupan, termasuk bisnis. Dalam kaitannya dengan sistem kapitalis dan sistem sosialis, koreksi etika bisnis Islam dapat membantu mengatasi kelemahan dan kekurangan keduanya. Dalam sistem kapitalis, koreksi etika bisnis Islam dapat membantu mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial dengan mendorong bisnis yang lebih adil dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam sistem sosialis, koreksi etika bisnis Islam dapat membantu mengatasi kekurangan dan kelemahan lainnya dengan mendorong kebebasan individu dan inovasi.

Dalam sintesis, koreksi etika bisnis Islam terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis sangat penting untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan keduanya. Dengan menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti kejujuran, kehormatan, dan keadilan, bisnis dapat dijalankan dengan cara yang lebih etis dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, koreksi etika bisnis Islam dapat membantu mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dalam berbagai sistem ekonomi.

Penelitian "Koreksi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis" adalah sebuah penelitian yang penting dan relevan dengan realitas global saat ini. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman etika bisnis Islam dan penerapannya dalam dunia nyata. Dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, etika bisnis Islam

dapat membantu mengurangi praktek-praktek yang tidak etis dan berkelanjutan, seperti korupsi, manipulasi pasar, dan eksploitasi sumber daya.

Penelitian terdahulu (Hidayat, 2014; Ikbal et al., 2023; Itang & Daenuri, 2017) membahas terkait dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, *novelty* dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana etika bisnis Islam mengkoreksi sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya etika bisnis Islam dalam mengarahkan perilaku bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi dampak negatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang tidak etis dan berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya menggunakan strategi library research atau penelitian kepustakaan. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data. Data primer meliputi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder mengacu pada sumber informasi lain, seperti artikel, jurnal, dan studi ilmiah, yang diperoleh untuk melengkapi data literatur yang ada. Penelitian ini mengkaji literatur yang ada mengenai teori perusahaan syariah dan membandingkannya dengan paradigma bisnis arus utama. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang komprehensif, di mana peneliti menganalisis semua materi dan sumber yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data yang berbeda: primer dan sekunder (Zed, 2008).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Bisnis Islam

Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Etika Islam tentang Kenakalan Remaja dalam kutipan Gumilar, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (mahmudah) (Gumilar, 2017).

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang disebut sebagai bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis (Darmawati, 2013).

Bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial terhadap masyarakat, negara dan Allah swt.

Pembahasan mengenai etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Hal ini sejalan dengan pendapat Beekun (1997) yang menyatakan bahwa etika bisnis Islam berlandaskan pada nilai-nilai Ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip utama etika bisnis Islam, seperti tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, selaras dengan konsep yang dibahas oleh Darmawati (2013) dan Ramadhany et al. (2023). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Badroen et al. (2006), menekankan pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Konsep ini diperkuat oleh grand teori yang dikemukakan oleh Chapra (1992), yang menyatakan bahwa etika bisnis Islam bertujuan untuk mencapai maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam aktivitas ekonomi.

Setiap prinsip yang terkandung dalam etika bisnis Islam tentunya berasal dari Al-Qur'an. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain (Ramadhany et al., 2023):

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ini ialah prinsip etika bisnis Islam yang berlandaskan atas ketauhid-an atau ketuhanan yang didasarkan pada tuhan yang maha esa, segala sesuatu berlandaskan kehendak Allah swt., dan segala prosedurnya yang dilakukan harus sesuai dengan syariahnya. Kegiatan bisnis dan penjualan haruslah berhubungan dengan prinsip dan tujuan Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Jasyiah/45:18;

الْأَمْرَ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ نَمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ

Terjemahnya:

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS Al-Jasyiah/45:18)

2. Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari kata Arab "al'adl". Ini secara etimologis berarti keadilan, ketidakberpihakan, atau generalisasi. Adil sendiri berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak

sewenang-wenang. Dalam bisnis Islam mengharuskan dalam menegakkan prinsip keadilan seperti dalam QS Al-Maidah/5: 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah/5: 8)

3. Prinsip Kehendak Bebas

Dari sudut pandang Islam, seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kemaslahatan tertinggi dari sumber daya yang tersedia di Kekuasaannya harus dikuasai dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan, tetapi kebebasan Islam dibatasi oleh hukum dan nilai Islam. Kehendak bebas tidak luput dengan persaingan bisnis dalam Islam, Allah swt. melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Sebagaimana ditulis dalam QS Al-Baqarah/2: 188 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah/2: 188)

4. Tanggung Jawab

Dunia etika bisnis, tanggung jawab dilakukan pada dua sisi: sisi vertikal yaitu kepada Allah swt., kepada masyarakat atau konsumen merupakan sisi horizontal. Tanggung Jawab pelaku bisnis terhadap bisnisnya harus menghadirkan keterbukaan, integritas, pelayanan yang optimal, dan melakukan yang terbaik dalam segala macam hal. Sebagaimana yang ditulis dalam QS Al-Muddasir/74: 38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan” (QS Al-Baqarah/2: 188)

5. Prinsip Kebenaran

Kebenaran di sini mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah bagian dari niat, sikap, dan tindakan yang tepat untuk melakukan berbagai proses, termasuk proses transaksional, proses

pengadaan produk, proses pengembangan produk, dan proses menghasilkan keuntungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Muthafiffin/83: 1-3 yang berbunyi;

إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ وَيَلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (QS Al-Muthafiffin/83: 1-3)

Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut (Baedowi, 2011) :

1. Kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya" (H.R. Al-Quzwani). "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami" (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.
2. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
3. Tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah:

يُخْسِرُونَ ۗ وَيَلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (QS Al-Muthaffifin/83: 1-3)

4. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain" (H.R. Muttafaq ‘alaih).
5. Tidak menimbun barang. Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menja di naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
6. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam.
7. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung," (H.R. Jabir).
8. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba, sebagaimana irman Allah,

بَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman," (QS. al-Baqarah/2: 278).

Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. al-Baqarah/2: 275).

Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba.

9. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah,

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَرَاحِيماً

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu," (QS. An-Nisa/4: 29).

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya." Hadis ini mengindikasikan bahwa

pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

B. Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang saat ini paling sukses merajai dunia dan hampir tidak ada negara-negara di dunia saat ini yang tidak menggunakan sistem ekonomi ini. Tetapi sejak ideologi kapitalisme diterapkan, nilai keagamaan, kemanusiaan dan moralitas semakin tergerus. Satu-satunya yang mendominasi hanyalah nilai material, namun nilai material ini pun malah memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karenanya timbul adanya istilah “yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin” (Yan, 2016b).

Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Adam Smith, bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri.

Kapitalisme mengakui kebebasan manusia tidak bisa bebas lepas tapi kebebasan manusia terbatas oleh kebebasan orang lain. Kebebasan ini yang menjadi bagian dari ajaran yang berlaku universal dalam masyarakat kapitalis. Dengan kebebasan ini, mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesamanya dalam rangka supaya tidak tersingkir dari pasar. Sistem kapitalis cenderung mendorong untuk berpikir oportunis dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi (Amiral, 2017).

Dalam sistem ekonomi kapitalisme mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut (Maskuroh, 2020).

1. Kebebasan memiliki harta secara perseorangan

Para pendukung ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Bahwasanya setiap negara mengakui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu memiliki kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas melakukan pekerjaan.

2. Kebebasan Ekonomi dan persaingan Bebas

Berdasarkan prinsip ekonomi dan tuntunannya yaitu persaingan bebas maka, untuk tiap individu dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut. Kapitalisme memahami persaingan bebas bukan merupakan hasil rancangan manusia walaupun mungkin disebabkan oleh manusia.

Kalaupun ada tujuan akhir yang hendak diketahui, tujuan tersebut tidak lain adalah kelestarian tatanan pasar bebas dan semua mereka yang ada di dalamnya. Persaingan bebas merupakan syarat bagi terjadinya pemberdayaan di berbagai sektor ekonomi, karena dengan persaingan bebas akan tercipta efisiensi ekonomi.

3. Ketimpangan Ekonomi

Modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan bagi sistem ekonomi kapitalis. Bahwasanya individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Ketika kita membicarakan tentang Sistem Ekonomi Kapitalis, kita tidak bisa melepaskan diri dari seorang tokoh bernama Adam Smith, karena dialah yang mencetuskan teori mengenai sistem ekonomi yang kemudian dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, dia juga merupakan “Bapak Ilmu Ekonomi.” Smith percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, selalu ingin mementingkan diri sendiri. Namun, menurut Smith sikap ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Lebih lanjut menurutnya, setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang, tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Smith juga mengungkapkan bahwa, tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, bukan belas kasihan orang lain dan juga bukan perikemanusiaan (Ubaid Al Faruq & Edi Mulyanto, n.d.).

Smith juga sangat menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan saja jalannya perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Menurut Smith, jika banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Agar pasar bebas yang didasarkan pada keinginan-keinginan individu tersebut bisa membawa perekonomian pada suatu keseimbangan yang efisien, maka Smith menerangkan bahwa walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak setiap aktivitas individu dalam mengejar kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat, justru lebih baik dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat (SUCIPTO, 2018).

Adapun menurut Adam Smith, ada tiga prinsip berkaitan dengan kebebasan sebagai berikut (Maskuroh, 2020):

1. *Freedom*, yaitu hak untuk produksi dan menjual produksinya menggunakan tenaga kerja, dan akumulasi kapital. Kebebasan ekonomi bermakna tidak adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Negara adalah institusi sosial yang akan melindungi kebebasan itu.
2. *Self Interest*, yaitu hak individu untuk berusaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Motivasi dasar ini menjadi kerangka kegiatan produksi. Dalam interaksi sosial, motivasi ini melahirkan harmoni dimana masing-masing kepentingan mencapai titik temu (com-mon platform) karena manusia saling membutuhkan barang atau jasa. Dengan demikian, dalam memenuhi kepentingan diri mengandung arti membantu orang lain.
3. *Competition*, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan. Persaingan menjadi kata kunci untuk menjaga kebebasan individu. Setiap individu memiliki hak untuk mengaktualisasi dan mengakumulasi modalnya. Interaksi ini melahirkan persaingan sempurna dan mekanisme pasar menjadi koridornya. Kombinasi motif mencari untung dan kebebasan berkompetisi akan menyusun sistem harga dan hukum dalam perekonomian.

Dalam sistem perokonomian ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kebaikan sistem ekonomi kapitalis

1. Kebebasan
2. Meningkatkan produksi
3. Profit motif

Kelemahan sistem ekonomi kapitalis

1. Tidak merata
2. Tidak selaras
3. Maksimasi profit
4. Krisis moral
5. Materialistis
6. Mengesampingkan kesejahteraan

Sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Setidak-tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan dalam atau untuk memiliki sumber daya. Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usaha dalam meraih keuntungan, sangat dihargai. Tidak ada batasan atau kekangan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah “setiap orang

menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian (Amiral, 2017).

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang menjadi ukuran barang dan jasa tersebut adalah faktor kegunaan (utility). Kegunaan (utility) ini sangat khas atau sangat personal. Dikatakan khas dan personal karena kegunaan (utility) tunduk pada keinginan orang perorang. Dengan kata lain, barang dan jasa itu dianggap mempunyai kegunaan, jika barang dan jasa itu dibutuhkan. Barang dan jasa tersebut dalam asumsi mereka dibutuhkan jika orang perorang yang menginginkannya.

Kapitalisme dapat dikatakan memiliki lima ciri-ciri menonjol dibawah ini (Maskuroh, 2020):

1. Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan “keinginan” (want) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
2. Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
3. Ia berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
4. Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributive.
5. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (self interest) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan maksimal dan kebebasan individu tanpa batas. Hal ini sejalan dengan pandangan Adam Smith yang dikemukakan oleh Sucipto (2018), yang menyatakan bahwa manusia didorong oleh kepentingan diri sendiri dan tangan tak terlihat (*invisible hand*) akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan.

Namun, sistem kapitalis juga menghadapi kritik dari berbagai pihak. Yan (2016) mengkritik sistem ini karena memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Maskuroh (2020) juga menyoroti kecenderungan sistem kapitalis untuk mengabaikan aspek moral dan spiritual dalam mengejar keuntungan material. Penelitian oleh Amiral (2017) menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem kapitalis, termasuk kebebasan ekonomi, persaingan bebas, dan ketimpangan ekonomi. Temuan ini didukung oleh grand teori Lippit (2015) yang menjelaskan prinsip-prinsip

utama dalam sistem kapitalis, seperti kepemilikan swasta atas alat-alat produksi dan persaingan bebas.

Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai smart solution dari berbagai sistem yang ada seperti halnya kapitalisme dan sosialisme karena ekonomi Islam dianggap menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya pada saat zaman Rasulullah Muhammad saw. dan pada masa khalifah Islamiyah sebab sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertikal antara manusia dengan Allah swt.

C. Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi kepada pemilik-pemilik swasta. Sementara itu komunisme menggambarkan peralihan kepemilikan dari swasta ke tangan pemerintah tersebut digambarkan terjadi secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Jadi, perbedaan antara keduanya adalah cara untuk mencapai tujuan, sedangkan persamaannya adalah mengenai tujuan yang ingin dicapai dari keduanya (Daud, 2018).

Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrem adalah komunisme. Keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dan dikontrol oleh kekuatan pusat. Komunisme dapat dikatakan sebagai bentuk sistem paling ekstrem, sebab untuk mencapai masyarakat komunis yang dicitacitakan diperoleh melalui suatu revolusi. Perekonomian yang didasarkan atas sistem yang segala sesuatunya serba dikomando ini sering juga disebut sistem perekonomian komando. Begitu juga, karena dalam sistem komunis negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komunis juga sering disebut sistem ekonomi totaliter. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah anarkisme. Istilah ini merujuk pada suatu kondisi sosial pemerintahan yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, melainkan dipercayakan pada asosiasi-asosiasi individu secara bebas dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada (Adawiah, 2013).

Sistem ekonomi sosialisme mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis, adalah bagaimana bersamasama mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau disebut kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan.

Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme (Yusuf, n.d.).

Pemikiran awal sosialis meletakkan unsur kemanusiaan pada posisi paling tinggi, lebih tinggi dari alat produksi. Bila alat produksi menguasai manusia maka manusia akan kehilangan esensi kemanusiaannya. Ia akan menjadi bagian dari alat produksi tersebut sehingga menjadikan kehidupan manusia seperti mesin sebagaimana “kehidupan” alat produksi. Sampai akhirnya alat produksi tersebut menjauhkan manusia untuk mengenal fungsinya sebagai manusia (Ghozali et al., 2019).

Marx mengatakan: “Pekerjanya tidak atas dasar sukarela tapi atas dasar paksaan. Jadi merupakan tenaga kerja paksa. Pekerjaannya tidak memuaskan kebutuhannya tapi semata-mata merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan orang lain, yaitu para majikan kapitalis yang memperalat kaum buruh untuk memperoleh keuntungan. Jadi, kapitalisme menurunkan derajat kemanusiaan (mendehumanisasi) para buruh yang merosot menjadi setingkat dengan barang komoditi” (Magnis-Suseno, 1999).

Jika di kapitalisme ada Adam Smith, maka di sosialisme ada Karl Marx. Pandangan dari Karl Marx sangat berpengaruh karena sangat dalam dan luas. Untuk membuktikan keburukan dari sistem ekonomi kapitalisme, Marx menggunakan argumen-argumen penentangan dari berbagai segi, baik dari segi moral, sosiologi maupun ekonomi (Magnis-Suseno, 1999).

Dari segi moral Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Di mana hal ini akan membawa masyarakat ke arah ekonomi yang tidak bisa dipertahankan. Di dalam sistem kapitalis ini ada kepincangan dan kesenjangan sosial. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis ada sekelompok orang yang menguasai kapital dan ada sekelompok orang yang menjadi kelas bawah (buruh). Jika tidak ada perbaikan, maka kaum buruh akan semakin bertambah. Untuk itu harus diganti dengan sistem ekonomi sosialis, yang lebih mengutamakan kaum buruh (Molan, 2010).

Demikian menurut Marx. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital dalam kapitalisme memang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya terjadi dalam kelas atas (pemilik modal). Untuk perlu suatu sistem yang pembangunannya bisa merata bagi seluruh lapisan rakyat, dan sistem itu adalah sistem ekonomi sosialis. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas, dan hal ini diakibatkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Dan kelas yang lebih bawah akan bangkit untuk membebaskan diri dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Karl Marx juga sangat menentang surplus value (nilai lebih), karena hal

itu akan semakin membawa kesengsaraan dan penindasan bagi kaum buruh dan semakin membawa keuntungan bagi kaum kapital (Molan, 2010).

Karl Marx mengungkapkan bahwa seluruh tindak tanduk manusia didorong oleh motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Ide atau gagasan mengenai agama, etika, seni, sosial, dan politik hanya ikut mewarnai. Marx juga mengungkapkan komunisme merupakan suatu aktivitas kolektif dalam mengontrol proses pembangunan serta produk kolektif. Aktivitas ini sendiri dilakukan dengan semangat kebebasan oleh komunitas-komunitas yang dibentuk secara bebas. Komunisme haruslah menghapuskan setiap hal yang bersifat eksternal dari individu, menghapuskan segala pekerjaan sosial yang mengasingkan dan tidak berlandaskan pada pilihan pribadi dan pada tujuan-tujuan yang dipilih secara sadar oleh pribadi (Magnis-Suseno, 1999).

Dalam masa selanjutnya, paham dan tulisan dari Marx ini sering disalah tafsirkan, sehingga muncul paham-paham yang baru mengenai sosialisme ini.

Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut:

1. Pemilikan harta oleh negara
2. Kesamaan ekonomi
3. Disiplin ekonomi

Dalam sistem ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi atau factor produksi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterima berdasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan asa yang dicurahkan. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Dalam sistem ekonomi sosialis, campur tangan pemerintah sangat tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi (what, how, for whom).

Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Karl Marx tentang penghapusan kepemilikan hak pribadi, prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak, seperti air, listrik, bahan pangan, dan sebagainya.

Adapun ciri dari sistem sosialis adalah sebagai berikut (Maskuroh, 2020):

1. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme)
Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
2. Peran pemerintah sangat kuat

Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis). Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).

Adapun kelebihan dari sistem sosialis adalah sebagai berikut (Maskuroh, 2020):

1. Disediakan kebutuhan pokok

Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.

2. Didasarkan perencanaan Negara

Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

3. Produksi dikelola oleh Negara

Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

Adapun kelemahan dari sistem sosialis adalah sebagai berikut:

1. Sulit melakukan transaksi

Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.

2. Membatasi kebebasan

Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi dictator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

3. Mengabaikan pendidikan moral

Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.

Dalam sistem ekonomi sosialis, terdapat penekanan pada kolektivisme dan peran negara yang sangat kuat dalam mengatur aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan pandangan Karl Marx yang dibahas oleh Magnis-Suseno (1999) dan Molan (2010), yang mengkritik sistem kapitalis dan menawarkan solusi melalui sistem sosialis.

Namun, sistem sosialis juga memiliki kelemahan, seperti yang dibahas oleh Adawiah (2013) dan Maskuroh (2020), termasuk membatasi kebebasan individu, mengabaikan pendidikan moral, dan kesulitan dalam melakukan transaksi ekonomi secara bebas. Penelitian oleh Ghozali et al. (2019) menganalisis konsep sosialisme dari perspektif Islam dan menemukan bahwa terdapat beberapa prinsip yang selaras, seperti kepemilikan negara atas aset-aset produksi utama dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Temuan ini didukung oleh grand teori Lerner (1972) dan Lippit (2015) yang menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam sistem sosialis.

D. Koreksi Etika Bisnis Islam dalam Sistem Ekonomi Sosialis dan Kapitalis

1. Koreksi etika bisnis islam dalam ekonomi sosialis

Sistem ekonomi sosialis memiliki beberapa prinsip yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kepemilikan negara atas aset-aset produksi utama, perencanaan ekonomi yang terpusat oleh negara, distribusi pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan dan subsidi, serta jaminan sosial bagi seluruh warga negara (Lerner 1972)(Lippit 2015). Namun, terdapat pula beberapa potensi ketidaksesuaian antara ekonomi sosialis dengan etika bisnis Islam yang perlu dikoreksi, sebagaimana berikut:

- a. Kepemilikan negara yang terlalu dominan, kepemilikan negara atas aset-aset produksi utama cenderung sangat dominan. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengakui hak kepemilikan individu atau swasta selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Koreksi yang perlu dilakukan adalah memberikan ruang yang lebih luas bagi sektor swasta untuk beroperasi dengan tetap tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Negara tidak seharusnya menguasai seluruh aset-aset produksi utama, melainkan harus ada pembagian yang adil antara kepemilikan negara dan kepemilikan swasta (Chapra 1992).
- b. Perencanaan Ekonomi yang Terlalu Sentralistik, perencanaan ekonomi dilakukan secara terpusat oleh negara. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang memberikan ruang bagi individu dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Etika bisnis islam menekankan untuk menghindari perencanaan ekonomi

yang terlalu sentralistik dan memberikan fleksibilitas bagi individu dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan tetap tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Negara dapat berperan sebagai regulator dan pengawas, namun tidak seharusnya mengatur setiap detail aktivitas ekonomi (Chapra 1992).

- c. Distribusi Pendapatan yang Kurang Optimal, upaya untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Namun, pendekatan ini berpotensi kurang optimal bila dibandingkan dengan ekonomi Islam yang mewajibkan membayar zakat sebagai mekanisme utama dalam mendistribusikan kekayaan (Al-Quran, 9:60). Dalam kewajiban zakat terdapat ketentuan yang jelas mengenai siapa yang wajib membayar zakat (muzakki) dan siapa yang berhak menerima zakat (mustahik). Hal ini berbeda dengan sistem perpajakan dan subsidi yang seringkali masih mengandung unsur ketidakadilan, seperti tarif pajak yang tidak proporsional atau penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. Sistem zakat tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting dalam Islam (Siddiqui 2001).

Dalam melakukan koreksi terhadap sistem ekonomi sosialis, etika bisnis Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepemilikan negara dan kepemilikan swasta. Hal ini didukung oleh pandangan Chapra (1992) dalam bukunya "Islam and the Economic Challenge" yang menyatakan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan individu atau swasta selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Penelitian oleh Khan (1994) dalam jurnalnya "An Introduction to Islamic Economics" mengkritisi pendekatan sentralistik dalam perencanaan ekonomi sosialis dan menawarkan alternatif berupa pendekatan yang lebih partisipatif, di mana individu dan sektor swasta diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan tetap tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, dalam melakukan distribusi pendapatan, etika bisnis Islam menganjurkan penerapan sistem zakat sebagai mekanisme utama, sebagaimana ditekankan oleh Siddiqui (2001) dalam jurnalnya "Islamic Banking: True Modes of Financing" yang menunjukkan bahwa pendekatan zakat lebih adil dan optimal dibandingkan sistem perpajakan dan subsidi dalam sistem sosialis yang seringkali mengandung unsur ketidakadilan. Temuan-temuan ini diperkuat oleh grand teori yang dikemukakan oleh Chapra (1992) dalam bukunya "Islam and the Economic Challenge" dan Al-Quran (ayat 9:60), yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam kepemilikan, partisipasi individu dalam aktivitas ekonomi, serta mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Koreksi etika bisnis Islam dalam ekonomi kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa prinsip yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kepemilikan swasta atas alat-alat produksi, kebebasan individu dalam membuat keputusan ekonomi, serta persaingan bebas antar pelaku ekonomi (Lippit 2015). Namun, terdapat pula beberapa potensi ketidaksesuaian antara ekonomi kapitalis dengan etika bisnis Islam yang perlu dikoreksi;

- a. Mekanisme Pasar yang Bebas Tanpa Kendali, mekanisme pasar dibebaskan sepenuhnya tanpa adanya pengaturan atau kendali dari negara. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perlu untuk menerapkan mekanisme pasar yang diatur dan tidak membiarkan mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas tanpa kendali. Negara harus berperan sebagai regulator dan pengawas untuk mencegah terjadinya eksploitasi, ketidakadilan, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Chapra 1992).
- b. Penumpukan Kekayaan di Tangan Segelintir Orang, terdapat kecenderungan terjadinya penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang akibat mekanisme pasar yang bebas dan minimnya regulasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang penumpukan kekayaan secara berlebihan dan mewajibkan pembayaran zakat (Al-Quran, 9:34-35). Sistem ekonomi Islam berkomitmen mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang melalui penerapan sistem zakat dan pembatasan kepemilikan berlebihan. Negara juga harus berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata kepada masyarakat (Siddiqui 2001).
- c. Eksploitasi Sumber Daya Alam Secara Berlebihan, terdapat kecenderungan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi mengejar keuntungan maksimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (Al-Quran, 30:41). Etika bisnis Islam pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan perlu dilakukan dalam aktivitas ekonomi. Negara harus berperan sebagai regulator untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab (Chapra 1992).
- d. Minimalisasi Peran Negara, dalam ekonomi kapitalis peran negara dalam perekonomian diminimalkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Negara harus berperan sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan bahwa seluruh

aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan (Beekun, R. I., & Badawi 2005).

- e. Kurangnya Penekanan pada Aspek Moral dan Spiritual, aspek moral dan spiritual cenderung diabaikan, dengan fokus utama pada pencapaian keuntungan material semata. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya aspek moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan perlu diintegrasikan ke dalam setiap aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi harus menyadari bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan material semata, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Beekun, R. I., & Badawi 2005).

Dalam melakukan koreksi terhadap sistem ekonomi kapitalis, etika bisnis Islam menekankan pentingnya peran negara sebagai regulator dan pengawas untuk mencegah terjadinya eksploitasi, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra (1992) dalam bukunya "*Islam and the Economic Challenge*" yang menyatakan bahwa negara harus berperan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian oleh Siddiqui (2001) dalam jurnalnya "*Islamic Banking: True Modes of Financing*" mengkritisi kecenderungan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dalam sistem kapitalis dan menganjurkan penerapan sistem zakat serta pembatasan kepemilikan berlebihan untuk mencegah hal tersebut. Temuan ini didukung oleh ayat Al-Quran (9:34-35) yang melarang penumpukan kekayaan secara berlebihan.

Selanjutnya, dalam aspek pelestarian lingkungan, etika bisnis Islam menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran (30:41) yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Temuan-temuan ini diperkuat oleh grand teori yang dikemukakan oleh Chapra (1992) dalam bukunya "*Islam and the Economic Challenge*" dan Beekun dan Badawi (2005) dalam bukunya "*Leadership: An Islamic Perspective*", yang menekankan pentingnya peran negara sebagai regulator dan pengawas, pencegahan penumpukan kekayaan yang berlebihan, serta integrasi aspek moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Dengan mengintegrasikan koreksi-koreksi ini, etika bisnis Islam dapat menjadi solusi alternatif yang komprehensif dalam menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Namun untuk mengimplementasikan koreksi etika bisnis Islam dalam sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Hal

ini sejalan dengan pandangan Naqvi (2003) dalam bukunya "Perspektif Islam tentang Ekonomi dan Masyarakat" yang menekankan pentingnya sinergi dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan etika bisnis Islam. Sebagaimana dibahas oleh Siddiqi (2004) dalam bukunya "Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition", pemerintah harus menjadi fasilitator dalam mengembangkan sistem ekonomi yang bebas dari unsur riba dan eksploitasi. Adapun pelaku bisnis dan perusahaan harus menjadikan etika bisnis Islam sebagai pedoman dalam operasional mereka. Penelitian oleh Ullah dan Jamali (2010) dalam jurnalnya "Institutional Investors and Corporate Social Responsibility" menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis Islam cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, peran akademisi dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang etika bisnis Islam. Sebagaimana dibahas oleh Beekun (1997) dalam bukunya "Islamic Business Ethics", pendidikan etika bisnis Islam harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.

Terakhir, masyarakat luas juga harus berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi implementasi etika bisnis Islam. Penelitian oleh Dusuki dan Abdullah (2007) dalam jurnalnya "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility" menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Dengan upaya yang komprehensif dan sinergi dari berbagai pihak, implementasi etika bisnis Islam dapat diwujudkan secara optimal, sehingga tercipta perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

D. SIMPULAN

Etika bisnis Islam merupakan pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan dalam meningkatkan produktivitas dan kebebasan individu, namun juga memiliki kelemahan seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi berlebihan, dan kurangnya penekanan pada aspek moral dan spiritual. Sistem ekonomi sosialis memiliki kelebihan dalam menyediakan kebutuhan pokok dan merata melalui perencanaan negara, namun juga memiliki kelemahan seperti membatasi kebebasan individu, mengabaikan pendidikan moral, dan perencanaan ekonomi yang terlalu sentralistik.

Koreksi etika bisnis Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan masing-masing sistem, dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, perlindungan lingkungan, dan penekanan pada aspek moral dan spiritual. Meskipun implementasi koreksi etika bisnis Islam dalam sistem ekonomi tetap membutuhkan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi, akademisi, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Adawiah, R. (2013). Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi (Sebuah Kajian Filsafat Ekonomi). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2).
- Adawiah, S. R. (2013). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Vol. 1)*. Pekanbaru: Suska Press.
- Amiral, A. (2017). Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(2), 147–162.
- Amiral, A. (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis dan Relevansinya dengan Perkembangan Ekonomi Islam. *Al-Intaj*, 3(1), 89-104.
- Badroen, F., Arief, S., Mizerski, D., & Mukhtar, S. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Baedowi, A. (2011). Sudut Pandang Rasulullah saw. tentang Etika Bisnis. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 1-18.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). *Leadership: An Islamic perspective*. Beltsville: MD: Amana Publications.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Darmawati, D. (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1).
- Daud, A. (2018). Ekonomi Sosialis Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 111-125.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Ghozali, A., Hamid, A., & Nugraha, A. T. (2019). Sosialisme Dalam Pandangan Islam. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 44-56.
- Gumilar, R. (2017). Etika Bisnis Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 137-146.
- Hidayat, S. (2014). Keadilan Sistem Ekonomi Islam (Syari'Ah): Komparasinya Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1).
- Ikbal, M., Dewi, N. D. T., & Syaifuddin, H. (2023). Problematika Ekonomi Kapitalis dan Sosialis Perspektif Ismail Raji Al-Faruqy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1197–1203.

- Itang, I., & Daenuri, A. (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18(01), 67–91.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.
- Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., & Ariansyah, N. R. (2023). Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan. *Islamic Education*, 1(3), 446–455.
- Lerner, A. P. (1972). *The Economics of Control: Principles of Welfare Economics*. New York: Macmillan.
- Lippit, V. D. (2015). Capitalism. In B. Dennis (Ed.), *The Encyclopedia of Applied Ethics* (2nd ed., pp. 381-388). San Diego: Academic Press.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maskuroh, M. (2020). Sistem Ekonomi Kapitalis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 220-245.
- Molan, B. (2010). Sosialisme Ekonomi: Karl Marx dan Karl Polanyi dalam Perbandingan. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 15(02), 287–322.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspektif Islam tentang Ekonomi dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Ramadhany, A. S., Zainuddin, E. H., & Afatara, I. B. (2023). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Penerapannya dalam Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 105-115.
- Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 13–26.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Siddiqui, S. H. (2001). *Islamic Banking: True Modes of Financing*. New Horizon, 109, 15-20.
- SUCIPTO, A. (2018). Sistem Ekonomi Kapitalis. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 103-108.
- SUCIPTO, M. C. S. M. C. (2018). ECONOMIC DEVELOPMENT IN ISLAMIC PERSPECTIVE. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 6(1), 60–123.
- Ubaid Al Faruq, & Edi Mulyanto. (n.d.). *Sistem Ekonomi Kapitalis Menurut Adam Smith*. Retrieved from <https://www.academia.edu/>
- Ubaid Al Faruq, S. P., & Edi Mulyanto, S. E. (n.d.). *SEJARAH TEORI-TEORI EKONOMI*.
- Ullah, S., & Jamali, D. (2010). Institutional Investors and Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 95(4), 575-597.
- Yan, R. (2016). Kapitalisme dan Keunggulan Sistem Ekonomi Islam. *Al-Intaj*, 2(1), 1-16
- Yusuf, A. B. A. (n.d.). *PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG LARANGAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN HARGA*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>

